



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 288 TAHUN 2023

**TENTANG
PANITIA PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan tugas, fungsi dan susunan organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kegiatan penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
- c. berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu prosedur untuk melakukan pemusnahan arsip yaitu

pembentukan panitia penilai arsip dan prosedur penyerahan arsip statis dilaksanakan setelah penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan serta panitia penilai arsip melakukan penilaian terhadap arsip usul serah;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penilai dan Penyusutan Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagai Panitia Penilai dan Penyusutan Arsip di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai dan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Panitia Penilai Arsip bertugas melakukan penilaian terhadap arsip yang akan diserahkan atau dimusnahkan; dan
- b. Panitia Penyusutan Arsip bertugas memusnahkan arsip berketerangan musnah dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 206 Tahun 2022 tentang Panitia Penilai dan Panitia Penyusutan Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
5. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA PENILAI DAN
PENYUSUTAN ARSIP LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 288 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Pengolah
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Arsiparis	
2.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	Anggota	1. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2. Arsiparis	
3.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Arsiparis	
4.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Pengembangan

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Pengolah
	Anggota	1. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 2. Arsiparis	Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Pengembangan
	Anggota	1. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 2. Arsiparis	Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional
	Anggota	1. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional 2. Arsiparis	
7.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
	Anggota	1. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan 2. Arsiparis	
8.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	Anggota	1. Direktur Sistem Pengadaan Digital 2. Arsiparis	
9.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Pasar Pengadaan Digital
	Anggota	1. Direktur Pasar Pengadaan Digital 2. Arsiparis	

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Pengolah
10.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	Anggota	1. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 2. Arsiparis	
11.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Sertifikasi Profesi
	Anggota	1. Direktorat Sertifikasi Profesi 2. Arsiparis	
12.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
	Anggota	1. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat 2. Arsiparis	
13.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
	Anggota	1. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 2. Arsiparis	
14.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	Anggota	1. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 2. Arsiparis	
15.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Inspektorat
	Anggota	1. Inspektur 2. Arsiparis	
16.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Pusat Pelatihan Sumber Daya

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Pengolah
	Anggota	1. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 2. Arsiparis	Manusia Pengadaan Barang/Jasa
17.	Ketua merangkap anggota	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Pusat Data dan Informasi
	Anggota	1. Kepala Pusat Data dan Informasi 2. Arsiparis	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI